

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Agro Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta   | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia          | <input type="checkbox"/> Koran Tempo     | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan     |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos                  | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo   | <input type="checkbox"/> Sinar Tani        |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily            | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya       |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional           | <input type="checkbox"/> Pelita          | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan   |
| <input type="checkbox"/> Kompas                    | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka  | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post  |
| <input type="checkbox"/> Kontan                    | <input type="checkbox"/> Republika       |  |

TANGGAL 2 MAY/ 2019  
 HALAMAN 21 / 1  
 RUBRIKASI  Berita  
 Berita Foto  
 Opini/Artikel  
 Tajuk  
 Pojok/Karikatur

# Anggaran Subsidi Pupuk

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menyesuaikan anggaran subsidi pupuk menyusul penyusutan luas lahan pertanian berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Badan Pertanahan Nasional.

## Disesuaikan

Anggara Fernando  
 anggara.fernando@bisnis.com

Berdasarkan rapat koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi di Istana Wakil Presiden pada Selasa (30/4), anggaran subsidi pupuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian dipangkas menyusul adanya data penyusutan luas lahan pertanian dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian Sarwo Edhy menuturkan bahwa dalam pembahasan tingkat menteri di Istana Wapres itu disebutkan volume pupuk bersubsidi yang diberikan untuk lahan per hektare untuk padi, jagung, dan palawija masih sama.

Perbedaan besaran pagu anggaran subsidi pupuk terjadi karena adanya penetapan lahan baru pertanian hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Nilainya [besaran pupuk subsidi] jadi Rp27,32 triliun. Itu untuk [lahan pertanian seluas] 7,1 juta hektare. DIPA kami [Kementerian Pertanian] Rp29 triliun," kata Sarwo di Istana Wakil Presiden, Selasa (30/4).

Dana subsidi pupuk sebesar Rp2 triliun yang sudah menjadi DIPA Kementerian Pertanian tersebut akan dijadikan sebagai dana cadangan. Dana tersebut akan digunakan untuk mengambil langkah taktis jika terjadi kekurangan pasokan pupuk di sejumlah daerah.

► **Pembangunan bendungan dan saluran irigasi mendorong peningkatan luas tanam padi kendati ada indikasi penyusutan luas lahan pertanian.**

Anggaran subsidi pupuk itu digunakan untuk pengadaan 8,87 juta ton pupuk dengan perincian pupuk urea 3,82 juta ton, SP36 sebanyak 779.000 ton, ZA sebanyak 996.000 ton, dan pupuk organik

sejumlah 948.000 ton.

Sarwo menambahkan bahwa sebagian besar dari pupuk subsidi ini akan menasar petani padi, yaitu mencapai 90%, sedangkan sisanya akan didistribusikan untuk tanaman jagung, palawija, dan perkebunan.

Kementerian Perindustrian memastikan bahwa volume produksi pupuk cukup untuk memenuhi kebutuhan petani.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa saat ini pabrik pupuk di Indonesia terus meningkatkan kinerja produksi. Pabrik pupuk, katanya, memastikan tersedianya kebutuhan pupuk bagi petani.

"Selama ini kebutuhan pupuk sudah mencukupi. Sebagian [produksi] juga kami ekspor," katanya di Istana Wakil Presiden, Selasa (30/4).

Dia menjelaskan bahwa pabrik pupuk dapat memenuhi permintaan pupuk ber-

subsidi yang diminta oleh pemerintah.

"Kami tunggu untuk volume, lalu jenis komoditas pangan kemudian nanti baru Menteri Keuangan menyusun anggaran 2020," katanya.

Rapat mengenai pupuk bersubsidi di Istana Wakil Presiden ini dihadiri oleh sejumlah menteri, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta sejumlah direktur jenderal dari kementerian, dan Badan Pertanahan Nasional.

### LUAS TANAM

Kementerian Pertanian memproyeksikan rerata produktivitas padi selama musim panen rendeng pada tahun ini mencapai 5,2 ton per hektare (ha).

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuturkan bahwa pihaknya melakukan sejumlah klarifikasi mengenai data untuk dijadikan dasar perhitungan subsidi pupuk. Kementerian Pertanian akan mengacu pada luas lahan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kami domainnya produksi. Data [luas lahan] yang [dikeluarkan] oleh BPN dengan BPS domainnya

beliau kan. Nah data itu ada beberapa saran dari bupati dan gubernur yang kami sampaikan [terkait alokasi pupuk-subsidi]," kata Amran di Istana Wakil Presiden, Selasa (30/4).

Amran menyebutkan bahwa alokasi pupuk harus mengacu pada sifat tanaman padi yang merupakan tanaman musiman.

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia              | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta   | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo     | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan     |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos                    | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo   | <input type="checkbox"/> Sinar Tani        |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily              | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya       |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional             | <input type="checkbox"/> Pelita          | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan   |
| <input type="checkbox"/> Kompas                      | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka  | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post  |
| <input type="checkbox"/> Kontan                      | <input type="checkbox"/> Republika       |  |

**TANGGAL** = 2 MAY 2019  
**HALAMAN** = 21 /  
**RUBRIKASI**  Berita  
 Berita Foto  
 Opini/Artikel  
 Tajuk  
 Pojok/Karikatur

Dia menilai, pengurangan luas lahan pertanian dari data BPS dan BPN tidak langsung akan mengurangi produksi [padi]. Pasalnya, intensitas tanam bisa dinaikkan.

"Ini pupuk [acuan volume pupuk bersubsidi] luas lahan. Bedakan antara luas lahan dan luas panen. Kalau data luas lahan 7,1 juta hektare maka kalau tanam dua kali per tahun kan [luas tanam] 14 juta hektare [yang jadi acuan] Kalau tanam tiga kali [per tahun] kan jadi 21 juta hektare [luas tanam padi per tahun]," katanya.

Amran menyebutkan bahwa penyesuaian indeks tanam ini yang seharusnya dijadikan dasar perhitungan dalam mengalokasikan pupuk subsidi.

Penyusutan luas lahan pertanian, katanya, tidak akan otomatis mengurangi volume pupuk bersubsidi.

Dia menilai bahwa dengan penyelesaian sejumlah bendungan dan pembangunan sejumlah saluran irigasi oleh pemerintah, data luas tanam pun harus disesuaikan lagi.

Infrastruktur bendungan dan irigasi itu akan meningkatkan indeks pertanian, misalnya dari sebelumnya hanya satu kali tanam bisa meningkat menjadi dua kali tanam.

"Jadi tergantung di lapangan [permintaan pupuk subsidi]. Kan ini indeks pertanian jagung, padi bisa naik dengan adanya pembangunan irigasi [bendungan dan jaringan irigasi]," katanya.

PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 2,86 juta ton sampai April 2019. Total penyaluran ini terdiri atas pupuk urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik.

Corporate Communication Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan bahwa total penyerapan pupuk tersebut mencapai 91% dari alokasi periode Januari—April 2019 sebesar 3,1 juta ton.

"Secara keseluruhan, total penyaluran pupuk bersubsidi tersebut sudah mencapai 32% dari total alokasi 2019 yang ditetapkan oleh pemerintah," katanya.

Wijaya menambahkan bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam Permentan No. 47/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.

Dalam beleid itu, total volume pupuk bersubsidi pada 2019 sebanyak 8,874 juta ton.

Dia menjelaskan bahwa memasuki musim tanam ini, total pupuk urea yang telah tersalurkan mencapai 1,25 juta ton, SP-36 sebesar 304.000 ton, ZA sebesar 289.000 ton, NPK sejumlah 802.000 ton, dan pupuk organik 215.000 ton.

"Secara keseluruhan, penyaluran pupuk bersubsidi berjalan cukup baik."

Wijaya menegaskan bahwa stok pupuk bersubsidi mencapai 305% dari kewajiban yang ditetapkan pemerintah.

Total stok pupuk bersubsidi sampai lini ketiga mencapai 1,1 juta ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 6 minggu ke depan.

"Sejumlah daerah diperkirakan sudah memasuki musim tanam pada Ramadan ini, jadi kemungkinan kebutuhan pupuk bersubsidi tetap bisa terpenuhi," katanya. *Ma-21*

2

## LAHAN PERTANIAN MENYUSUT

BPS menyatakan bahwa luas lahan pertanian di Indonesia menyusut. Saat ini, luas lahan pertanian di Indonesia 7,1 juta ha. Penyusutan luas lahan pertanian itu memengaruhi pengalokasian pupuk bersubsidi.

**Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Juta Ton)**



<input type="checkbox"/> Agro Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Jakarta	<input type="checkbox"/> Seputar Indonesia
<input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Tempo	<input type="checkbox"/> Sinar Harapan
<input type="checkbox"/> Indo Pos	<input type="checkbox"/> Majalah Tempo	<input type="checkbox"/> Sinar Tani
<input type="checkbox"/> Investor Daily	<input type="checkbox"/> Media Indonesia	<input type="checkbox"/> Suara Karya
<input type="checkbox"/> Jurnal Nasional	<input type="checkbox"/> Pelita	<input type="checkbox"/> Suara Pembaruan
<input type="checkbox"/> Kompas	<input checked="" type="checkbox"/> Rakyat Merdeka	<input type="checkbox"/> The Jakarta Post
<input type="checkbox"/> Kontan	<input type="checkbox"/> Republika	

TANGGAL	2 MAY 2019
HALAMAN	7 / 1
RUBRIKASI	<input checked="" type="checkbox"/> Berita
	<input type="checkbox"/> Berita Foto
	<input type="checkbox"/> Opini/Artikel
	<input type="checkbox"/> Tajuk
	<input type="checkbox"/> Pojok/Karikatur

## Jelang Puasa Ramadan Jaga Harga Pangan, Libatkan Dewan

ANGGOTA Komisi IV DPR Endang Srikarti Handayani meyakini Pemerintah sudah sudah punya jurus untuk mencegah kenaikan harga pangan di Puasa dan Lebaran nanti. Namun, agar jurus tersebut ampuh, dia meminta Pemerintah terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai kalangan.

"Pemerintah tidak bisa sendiri. Harus mampu bekerja sama dengan stakeholders, termasuk para wakil rakyat (anggota DPR). Wakil rakyat juga mesti dilibatkan ke pasar untuk sosialisasi tentang harga. Karena wakil rakyat itu juga memiliki kewajiban, tidak hanya mengawasi tapi juga melakukan juga memberikan perlindungan ke konsumen," kata Endang, kemarin. **RM. 1**

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, biasanya, menjelang Puasa harga pangan naik. Sebab, permintaannya tinggi. Beberapa pangan yang berpotensi mengalami lonjakan antara lain ayam daging, cabe, bawang merah, bawang putih, dan telur. Kenaikan tersebut su-

dah terasa sejak pekan kemarin. Untungnya, Pemerintah sigap.

"Telur sudah mulai ada kenaikan, tapi masih taraf wajar. Bawang putih juga demikian, tapi sekarang sudah mulai stabil. Sebab, sudah ada persiapan untuk impor. Pemerintah sudah jauh-jauh hari melakukan persiapan untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan dan kebutuhan saat Ramadan," tambah dia.

Kondisi harga-harga yang lain saat ini relatif stabil. Di Pasar Induk Kramat Jati, yang merupakan barometer di Jabodetabek, harga berbagai komoditas bahan pokok terpantau normal. Harga cabe, bawang merah, dan bawang putih terpantau stabil. Tidak mengalami penurunan maupun kenaikan signifikan.

Pasokan yang masuk juga aman. Untuk cabe merah kriting sebanyak 48 ton dengan harga Rp 17.000 per kilogram, cabe merah besar 12 ton dengan harga Rp 28.000 per kilogram, cabe rawit merah 63 ton dengan harga Rp 20.000 per kilogram, cabe

rawit hijau 23 ton dengan harga Rp 13.000 per kilogram, dan bawang merah 94 ton dengan harga Rp 20.000 per kilogram.

"Kalau untuk cabe rawit kita dapat dari daerah Rembang dan Muntilan. Karena daerah tersebut sedang panen serentak sehingga dapat dikatakan pasokan untuk menghadapi Puasa dan Lebaran aman," ujar Jiman, salah satu pedagang besar cabe rawit di Kramat Jati.

Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menegaskan, sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, pihak terus bekerja keras menjaga pasokan dan stabilisasi harga. Terutama cabe dan bawang merah.

"Petani di Semarang lagi panen cabe besar 500 hektare dan cabe rawit 375 hektare pada Mei ini. Demikian juga Juni masih panen yang sama sehingga siap dan cukup untuk memasok Jakarta," kata Suwandi saat memantau panen cabe di Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Semarang, Jawa Tengah, kemarin. ■ KAL

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia   | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta              | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia | <input type="checkbox"/> Koran Tempo                | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan     |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos         | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo              | <input type="checkbox"/> Sinar Tani        |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily   | <input checked="" type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya       |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional  | <input type="checkbox"/> Pelita                     | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan   |
| <input type="checkbox"/> Kompas           | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka             | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post  |
| <input type="checkbox"/> Kontan           | <input type="checkbox"/> Republika                  |  |

- RUBRIKASI
- Berita
  - Berita Foto
  - Opini/Artikel
  - Tajuk
  - Pojok/Karikatur



**CEK HARGA SEMBAKO:** Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) blusukan ke Pasar Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Kedatangan Khofifah ke pasar tradisional tersebut untuk memantau harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan. *21.21*

# Cegah Harga Naik OP Digelar

**BADAN** Urusan Logistik Divisi Regional (Divre) Jawa Timur menggelar operasi pasar sejumlah komoditas untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan. *M1-21*

"Mulai besok, Bulog memulai operasi pasar (OP) di Surabaya," kata Kepala Badan Bulog Divre Jawa Timur Muhammad Hasyim di Surabaya, kemarin. Bulog akan memulai OP dari Surabaya Utara. Operasi ini akan dilakukan sepanjang Ramadan hingga Lebaran.

Komoditas yang ada di Bulog seperti beras, gula pasir, tepung terigu, dan minyak goreng akan dijadikan sasaran OP. "Kami akan menggelar OP sekalipun Ibu (Khofifah) tadi mengatakan harganya stabil. Supaya jangan nanti sudah naik, baru kita OP-kan, sudah sulit, ya," kata Hasyim.

Di Palembang, kemarin, Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumatra

Selatan menggelar High Level Meeting untuk mengevaluasi kinerja pengendalian inflasi pada Hari Besar Keagamaan Nasional serta mengoordinasikan kegiatan pengendalian inflasi di provinsi maupun di kabupaten/kota.

Kepala BPS Provinsi Sumsel Endang Tri Wahyuningsih menyampaikan beberapa komoditas yang perlu diperhatikan, yakni beras dan bawang merah. Beras memiliki rantai pasok yang sangat panjang ada tambahan rantai pasok melewati pedagang grosir yang sebelumnya tidak ada. "Hal ini bertolak belakang dengan karakteristik Sumsel yang merupakan produsen beras terbesar ke-5 di Indonesia. Selanjutnya 90% pasokan bawang merah Sumsel masih dipenuhi dari luar provinsi," kata dia.

Pantauan di lapangan, kemarin, harga kebutuhan pokok di pasar

tradisional di Priangan Timur merangkak naik terutama bawang putih, bawang merah, daging ayam, daging sapi, dan sayuran. Eko, seorang pedagang, mengatakan harga bawang putih semula Rp20 ribu menjadi Rp40 ribu/kg, bawang merah dari Rp18 ribu kini Rp62 ribu/kg.

Kepala UPTD Pasar Induk Cikurubuk Augus mengakui kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas pertanian lain seperti kentang dari Rp10 ribu menjadi Rp16 ribu/kg, kacang tanah semula Rp20 ribu menjadi Rp26 ribu/kg. "Telur semula Rp19 ribu menjadi Rp24 ribu, daging ayam boiler Rp28 ribu menjadi Rp45 ribu," pungkasnya.

Hal serupa terjadi di Provinsi Aceh. Di Kabupaten Pidie, Kota Banda Aceh, harga daging ayam sejak empat hari terakhir naik. Kenaikan harga juga berlaku pada daging bebek dari Rp60 ribu menjadi Rp75 ribu per ekor. Tingginya harga daging ayam potong dan bebek itu ditengarai permainan harga pasar.

"Mereka sering memainkan harga saat kebutuhan warga lebih tinggi," ujar Zainal Abidin, seorang pedagang di Banda Aceh. (FL/DW/MR/BB/DG/PO/AD/N-1)

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia    | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta   | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia  | <input type="checkbox"/> Koran Tempo     | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan     |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos          | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo   | <input type="checkbox"/> Sinar Tani        |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily    | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya       |
| <input type="checkbox"/> Jurnal Nasional   | <input type="checkbox"/> Pelita          | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kompas | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka  | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post  |
| <input type="checkbox"/> Kontan            | <input type="checkbox"/> Republika       |  |

TANGGAL **12 MAY 2019**  
 HALAMAN **2 / 1**  
 RUBRIKASI  Berita  
 Berita Foto  
 Opini/Artikel  
 Tajuk  
 Pojok/Karikatur

# Kanal Alternatif Penyaluran Beras

**Toto Subandriyo**

Pemerhati Masalah Sosial Ekonomi Pertanian

**Impres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah menugaskan Perum Bulog membeli gabah/beras hasil panen petani dan menyalurkan cadangan beras pemerintah untuk menjaga stabilitas harga.**

Saat ini tugas itu terkendala oleh adanya perubahan mekanisme bantuan pangan ke masyarakat yang semula dalam bentuk beras berubah menjadi dalam bentuk transfer langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja penyaluran beras pemerintah. Kanal penyaluran yang semakin sempit mengakibatkan stok beras pemerintah menumpuk di gudang-gudang Bulog.

Realisasi penyaluran beras untuk masyarakat prasejahtera tahun 2018 hanya mencapai 1,20 juta ton, jauh di bawah realisasi 2017 (2,54 juta ton), apalagi 2016 (2,78 juta ton).

Januari-April 2019, Bulog hanya diberi tugas menyalurkan sekitar 213.000 ton (*Kompas*, 15/2).

Banyak kalangan telah memprediksi ini akan terjadi saat program Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) mulai digulirkan pemerintah. Seperti kita ketahui pada awal 2017, pemerintah resmi meluncurkan program BPNT di 44 kota di seluruh Indonesia. Program itu transformasi dari program beras untuk warga miskin (*raskin*) atau

program beras sejahtera (*rastra*). Tujuan, program *raskin/rastra* dan BPNT sebenarnya sama: mengurangi beban pengeluaran kelompok sasaran lewat pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

Program *raskin/rastra* juga ditujukan meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Studi Benny Rachman dkk (2018), kontribusi beras BPNT terhadap kebutuhan beras KPM hanya 25-34 persen.

## Meredam inflasi

Menyempitnya kanal penyaluran cadangan beras pemerintah tidak hanya berdampak terhadap menumpuknya stok beras di gudang Bulog, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap kinerja Bulog dalam penyerapan gabah/beras petani. Sebelum program BPNT ini digulirkan, rata-rata prognosis pengadaan

Bulog terhadap beras petani mencapai 2,8 juta ton per tahun.

Terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, jujur kita mengakui bahwa program *raskin/rastra* yang telah berjalan lebih dari 18 tahun ini sangat bermanfaat dalam menjaga stabilitas harga beras. Program *raskin/rastra* terbukti sangat ampuh dalam meredam gejolak inflasi yang terjadi.

Beberapa tahun terakhir, in-

flasi di negeri ini lebih banyak dipicu fluktuasi harga kelompok pangan bergejolak (*volatile foods*) seperti beras. Untuk menjinakkan gejolak harga beras, penyaluran *raskin/rastra* lebih efektif dibandingkan dengan instrumen operasi pasar (OP). Hal itu disebabkan penyaluran *raskin/rastra* dapat menjangkau sasaran yang sangat luas, meliputi tidak kurang dari 15 juta rumah tangga sasaran (RTS). Volume *raskin/rastra* per tahun sekitar 2,7 ton. Ditambah dengan harga tebus yang terjangkau daya beli warga miskin membuat harga beras di pasaran stabil selama satu dasawarsa terakhir.

Manfaat lain dari program *raskin/rastra* yang tak kalah penting adalah sebagai kanal penyaluran cadangan beras pemerintah yang diperoleh dari hasil pengadaan



- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agro Indonesia             | <input type="checkbox"/> Koran Jakarta   | <input type="checkbox"/> Seputar Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Bisnis Indonesia           | <input type="checkbox"/> Koran Tempo     | <input type="checkbox"/> Sinar Harapan     |
| <input type="checkbox"/> Indo Pos                   | <input type="checkbox"/> Majalah Tempo   | <input type="checkbox"/> Sinar Tani        |
| <input type="checkbox"/> Investor Daily             | <input type="checkbox"/> Media Indonesia | <input type="checkbox"/> Suara Karya       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jurnal Nasional | <input type="checkbox"/> Pelita          | <input type="checkbox"/> Suara Pembaruan   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kompas          | <input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka  | <input type="checkbox"/> The Jakarta Post  |
| <input type="checkbox"/> Kontan                     | <input type="checkbox"/> Republika       |  |

TANGGAL - 12 MAY 2019  
 HALAMAN - 77  
 RUBRIKASI  Berita  
 Berita Foto  
 Opini/Artikel  
 Tajuk  
 Pojok/Karikatur

gabah/beras petani. Inpres Nomor 5 Tahun 2015 telah memberikan jaminan kepada petani dalam menjual gabah/beras hasil panen mereka melalui mekanisme harga pembelian pemerintah (HPP). Melalui mekanisme inilah petani akan terlindungi dari kejatuhan harga, terutama saat panen raya. Nah, barangkali manfaat inilah yang luput dari pertimbangan para penentu kebijakan saat memutuskan program BPNT.

**Kanal alternatif**

Untuk mengatasi kebuntuan yang saat ini dihadapi pemerintah dalam penyaluran cadangan beras pemerintah, ada beberapa alternatif kanal penyaluran yang dapat ditempuh, antara lain melalui penyaluran golongan anggaran, yaitu dengan memberikan tunjangan beras bagi PNS/TNI/Polri yang selama ini disalurkan dalam bentuk uang sebagai komponen dari gaji bulanan.

Semua PNS/TNI/Polri beserta anak dan istrinya yang sudah bertugas sejak masa Orde Baru pasti pernah menerima jatah beras dari pemerintah setiap bulan. Dengan berbagai pertimbangan, kebijakan itu dihentikan dan tunjangan beras tersebut diberikan dalam bentuk uang (saat ini besarnya adalah Rp 72.420 per jiwa/bulan).

Jumlah total PNS di Indonesia 4,37 juta orang. Jika diasumsikan jumlah yang men-

jadi tanggungan negara dari setiap PNS hanya istri/suami (rata-rata dua orang, tanpa anak), jumlah beras yang bisa disalurkan melalui golongan anggaran ini tidak kurang dari 0,87 juta ton per bulan atau sekitar 10 juta ton per tahun. Nominal yang sangat cukup untuk meng-

gairahkan kembali usaha tani padi dan usaha di bidang perberasan.

Upaya lain yang dapat ditempuh adalah dengan program yang lebih bernuansa pemberdayaan masyarakat. Salah satu alternatifnya, padat karya pangan (PKP). Para buruh tani, para penganggur, dan sejenisnya dapat bekerja memperbaiki sarana infrastruktur di pedesaan, seperti saluran irigasi, jalan usaha tani, jalan desa, dan sarana infrastruktur lain sejenis dengan upah beras. Kenyataan dalam praktik, meskipun harga tebus raskin Rp 1.600 per kilogram, banyak warga yang betul-betul miskin tidak mempunyai akses untuk membeli. Akhirnya beras itu pun jatuh ke tangan penduduk yang mampu menebus dengan uang kontan.

Dalam program padat karya pangan, penduduk miskin hanya bermodalkan tenaga untuk dapat upah beras. Melalui cara seperti ini kelompok sasaran akan lebih terseleksi dan tepat sasaran karena warga yang tergolong kaya tak akan menyeroobot hak warga miskin. Lebih jauh lagi, nilai manfaat program ini akan sangat dirasakan semua warga masyarakat baik yang tergolong miskin maupun mampu. Apalagi jika beras itu pengadaannya dari beras petani setempat, bukan dari impor.

Para pakar sosial ekonomi memprediksi beras tetap akan menjadi sumber pangan pokok penduduk Indonesia sampai kapan pun. Pepatah China mengatakan, "Tanpa beras, ibu rumah tangga paling cerdas pun tidak bisa memasak". Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya serius agar animo para petani untuk berusaha tani padi tetap tinggi untuk bisa memberi makan bangsa ini. K7